

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Putri Nilam Cahyaning Rahmadani¹, Muhammad Agus Muljanto²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

putriahmadani315@gmail.com

ABSTRACT

Sidoarjo Regency is listed as one of the three regions in East Java Province that will experience the most disasters in 2022, which could threaten the safety of its citizens, especially groups vulnerable to disasters, one of which is children. The Taruna Siaga Bencana (TAGANA) aims to provide early education to students on how deal with disaster in order to reduce the risk of disaster occurring. This research aims to determine and analyze the success of implementing TAGANA Masuk Sekolah program in Sidoarjo Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data collection uses interviews, observation, and documentation. This research uses a policy implementation model focus according to Geoge C. Edward III which consists of (i) Communication, (ii) Resources, (iii) Disposition, (iv) Bureaucratic Structure. The technique for determining informants uses purposive sampling and snowball sampling. The results of this research indicate that the implementation of Tagana School Entry program in Sidoarjo Regency has not been implemented wel. This is because there are still obstacles in communication and officers do not receive incentives, which can affect the success of implementing a policy.

Keywords: Program implementation, TAGANA, Disaster Management

ABSTRAK

Kabupaten Sidoarjo tercatat ke dalam tiga daerah di Provinsi Jawa Timur yang paling banyak mengalami bencana pada tahun 2022 yang dimana hal tersebut dapat mengancam keselamatan warga terutama pada kelompok rentan bencana salah satunya anak-anak. Program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ini bertujuan untuk memberikan edukasi dini kepada siswa tentang cara menghadapi bencana agar dapat mengurangi risiko bencana yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana keberhasilan implementasi program TAGANA Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan fokus model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang terdiri dari i. Komunikasi, ii. Sumber daya, iii. Disposisi, iv. Struktur birokrasi. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan hambatan dalam berkomunikasi dan petugas tidak mendapatkan insentif yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Kata kunci: Implementasi Program, TAGANA, Penanggulangan Bencana

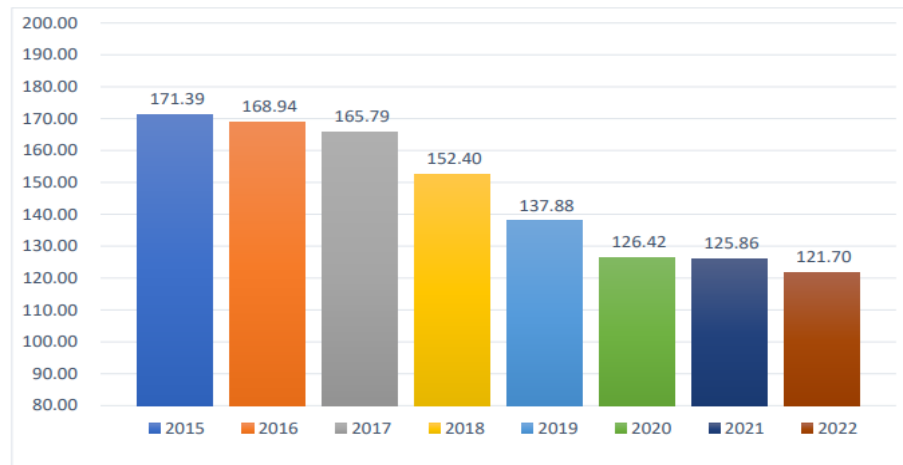
PENDAHULUAN

Kebijakan publik menurut Kamus Administrasi Publik yang dikutip dalam (Meutia, 2017:24) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menangani masalah publik yang bertujuan agar dapat mencapai tujuan yang telah dicita-citakan bersama. Substansi kebijakan publik dalam negara berkembang pada umumnya adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penggunaan sumber daya publik, penyediaan layanan, arah kegiatan masyarakat, serta menjamin ketenteraman dan keamanan publik (Muljanto, 2021). Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki empat tujuan salah satunya yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Hal ini berarti seluruh komponen bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam dan nilai-nilai bangsa harus dilindungi.

Indonesia merupakan negara kepulauan, Badan Informasi Geospasial pada tahun 2023 telah meresmikan dan membakukan sejumlah pulau mencapai 17.024 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan *World Risk Report* 2023 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke- 2 (dua) negara paling rawan bencana di dunia dengan *World Risk Index* sebesar 43,50. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah-wilayah di Indonesia berpotensi besar untuk terjadi bencana.

Bencana merupakan peristiwa yang dapat mengancam jiwa dan merugikan manusia yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam. Menurut UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Bencana merupakan kejadian yang mengancam, mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor alam ataupun ulah tangan manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan serta dampak psikologis. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai bencana dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Alam menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana yang paling meresahkan karena ketidakpastiannya terhadap kapan, dimana, risiko, dan dampak yang ditimbulkan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana adalah Provinsi Jawa Timur. Menurut data Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022 Provinsi Jawa Timur memiliki indeks risiko sebesar 121,70 dengan skala sedang. Berikut data nilai indeks risiko bencana provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 sampai dengan 2022.



Gambar 1. Grafik Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2022

Sumber : Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2022

Berdasarkan gambar di atas terjadi penurunan indeks risiko bencana di Jawa Timur dari tahun 2021 sebesar 125,86 menjadi sebesar 121,70 pada tahun 2022. Meskipun indeks risiko bencana turun, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat sejak Januari hingga November tahun 2022 telah terjadi bencana alam di Jawa Timur sebanyak 211 kejadian, yang didominasi oleh bencana banjir sejumlah 107 kejadian, bencana angin kencang 78 kejadian, dan bencana tanah longsor sebanyak 8 kejadian. BPBD Jawa Timur juga mencatat tiga daerah yang paling banyak mengalami bencana pada tahun 2022 antara lain Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sidoarjo (Pratama, 2022).

Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam tiga besar daerah di Jawa Timur yang paling sering terjadi bencana pada tahun 2022. Berdasarkan tabel indeks risiko bencana kabupaten/kota tahun 2022 yang dibuat oleh BNPB dalam buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki indeks risiko bencana sedang dengan skor 90,52. Adapun data kejadian bencana di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kejadian bencana di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2022

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo tahun 2019-2022

Jenis Bencana	2019	2020	2021	2022
Angin Puting Beliung	25	36	77	42
Banjir	53	24	57	22
Gempa	-	-	6	-
Tanah Longsor	-	-	-	-

Menurut data BPS di atas bencana yang sering terjadi di Kabupaten Sidoarjo adalah banjir dan angin puting beliung. Bencana banjir dapat disebabkan oleh curah

hujan yang tinggi di daerah hulu sehingga menyebabkan banjir di hilir serta aktivitas manusia yang dapat memperparah dampak bencana tersebut. Akibatnya menimbulkan kerugian diantaranya rumah terendam banjir, akses terhambat, bahkan sampai menelan korban jiwa. Kabupaten Sidoarjo menjadi hilir bagi aliran Sungai Brantas melalui Sungai Porong. Hal itu mengakibatkan Sidoarjo rawan bencana banjir kiriman dari hulu dan akibat pasang air laut atau rob (Armando & Arif, 2023). Angin kencang juga sering terjadi ketika musim pancaroba. Angin puting beliung dapat mengakibatkan kerusakan bangunan/rumah menumbangkan pohon, merusak tumbuhan pertanian warga, merusak jaringan listrik hingga mengakibatkan korban jiwa. Ancaman bencana alam tersebut akan berdampak pada semua sektor. Bencana alam mengakibatkan kerusakan fisik dan korban jiwa selain itu bencana alam juga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat (Utomo & Marta, 2022). Tidak hanya berdampak pada perekonomian, bencana juga akan berdampak pada sektor pendidikan.

Menurut Undang-undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 tahun 2007 pasal 55 ayat 2 menyebutkan bahwa bayi, balita dan anak-anak termasuk salah satu kelompok rentan bencana. Anak-anak termasuk kelompok yang paling rentan ketika terjadi bencana meskipun sedang berada bersama orang tua atau keluarganya karena situasi dan kondisi bencana sering kali menimbulkan kepanikan yang luar biasa sehingga terdapat kemungkinan anak terpisah dari orang tuanya saat berusaha menyelamatkan diri atau orang tua mengalami kesulitan untuk menyelamatkan anaknya. Ancaman dan dampak bencana semakin tinggi dalam peristiwa bencana yang terjadi pada saat anak-anak berada di sekolah atau ketika jam-jam kerja di mana orang tua sedang melakukan kegiatan yang terpisah dengan anak-anaknya. Menyadari dampak yang ditimbulkan bencana, sebuah kewajiban bagi kabupaten/kota untuk melakukan tindakan antisipatif sebelum datangnya bencana dengan harapan diantaranya dapat mengurangi risiko bencana itu sendiri (Lukman, 2020). Upaya untuk mengurangi risiko bencana itu disebut dengan mitigasi bencana. Dalam UU No. 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat (9) menerangkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Dalam hal ini merujuk Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 & Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Mitigasi Kebencanaan Pada Satuan Pendidikan Melalui Program TAGANA Masuk Sekolah. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo melalui TAGANA menyelenggarakan program tersebut di sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo. Program ini termasuk dalam salah satu fungsi TAGANA yaitu saat pra bencana dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat terkait pengurangan risiko bencana dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kemungkinan terjadi bencana. Peningkatan kapasitas ini dalam pendidikan berhubungan dengan perkembangan kognitif anak yaitu kemampuan yang berkaitan dengan otak yang dimiliki setiap

orang dengan kata lain ketika seseorang melakukan kegiatan yang menggunakan kekuatan otak maka itu menggunakan kemampuan kognitif (Yasmin, 2023). Sedangkan, peningkatan kesiapsiagaan berkaitan dengan perkembangan psikomotorik anak karena menuntut anak untuk bergerak secara fisik dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan dan kemauan dari dalam diri seseorang (Yasmin, 2023).

Program TAGANA Masuk Sekolah bertujuan untuk memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kepada siswa sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja dan diharapkan dapat mengurangi risiko ketika terjadi bencana (Kementerian Sosial, 2020). Adapun sasaran daripada program tersebut adalah warga sekolah yaitu siswa, guru, karyawan sekolah maupun orang tua siswa.

Namun permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 program TAGANA Masuk Sekolah masih minim dilakukan. Mengingat Kabupaten Sidoarjo termasuk tiga besar daerah di Jawa Timur yang paling sering terjadi bencana, sudah sepatutnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengencangkan sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana melalui program TAGANA Masuk Sekolah agar ketika siswa menghadapi bencana tidak panik dan dapat segera melakukan tindakan penyelamatan. Dengan begitu, jika semakin banyak siswa yang memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi tiba-tiba, diharapkan nantinya akan mengurangi potensi kerugian yang akan ditimbulkan.

Oleh karena itu, adanya fenomena di atas dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu program. Berdasarkan hal tersebut George C. Edward III dalam (Leo Agustino, 2022) mengemukakan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program. Empat variabel itu adalah (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur birokrasi. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi program TAGANA Masuk Sekolah pada tahun 2023.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan “Bagaimana Implementasi Program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana keberhasilan implementasi Program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara mendalam terkait bagaimana implementasi program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara terhadap 10 informan yang terdiri dari pembina, koordinator, anggota tim pelaksana program, guru, dan siswa yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari arsip dokumen, berita, maupun jurnal yang relevan. Penentuan informan berdasarkan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Penentuan berdasarkan teknik tersebut karena penentuan informan dilakukan dengan sengaja yang dirasa ahli pada bidangnya, namun jika data yang diperoleh belum lengkap maka peneliti mencari orang lain untuk melengkapi data tersebut. Informan penelitian ini terdiri dari 1 Staf Pengadministrasian Umum Dinas Sosial Kabupaten sekaligus Pembina TAGANA, 1 Koordinator Pelaksana program, 1 Anggota tim pelaksana program, 3 guru, dan 4 siswa. Lokasi penelitian ini yaitu pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Waktu penelitian berlangsung mulai dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024. Fokus penelitian ini yaitu model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang dikutip oleh (Leo Agustino, 2022) yang terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Abdussamad, 2021) yang didalamnya dijelaskan aktivitas dalam analisis data yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh (Anggara, 2014:232) implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya yaitu terkait implementasi program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Pemaparan hasil penelitian akan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang dikutip oleh (Leo Agustino, 2022) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.

Komunikasi

Menurut Edward III dalam (Leo Agustino, 2022) mengemukakan tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Dalam proses komunikasi harus dilakukan dengan efektif agar pesan atau informasi yang disampaikan dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Berkaitan dengan penyaluran komunikasi (transmisi) pada pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo, penyaluran komunikasi yang dilakukan berupa perintah dan informasi. Terkait informasi dari Kementerian Sosial telah tersalurkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, kemudian ke koordinator pelaksana dan anggota tim pelaksana lainnya. Sehingga pelaksana program dapat memahami dengan jelas terkait program. Namun, dalam wawancara yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo selaku pembina masih mengalami hambatan dalam memberikan perintah karena Tagana masih bersifat relawan. Dalam penyaluran komunikasi terdapat media yang digunakan baik antar pelaksana maupun dengan peserta. Media yang digunakan antar pelaksana untuk menyalurkan komunikasi yaitu dengan menggunakan Whatsapp group, dan melakukan rapat koordinasi secara langsung tatap muka. Sedangkan, penyaluran komunikasi yang dilakukan kepada peserta program dilakukan secara langsung dengan menggunakan cara yang berbeda pada tiap tingkatan sekolah agar peserta program mudah memahami. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Edward III yang dikutip dalam (Leo Agustino, 2022: 154) bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Kejelasan komunikasi dalam pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo sudah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan temuan peneliti di lapangan yang dimana murid-murid yang telah mendapatkan sosialisasi mengerti apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana gempa yang berpusat di Tuban, Jawa Timur, namun efek guncangan terasa sampai Kabupaten Sidoarjo yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2024. Dalam dunia pendidikan sosialisasi ini bermanfaat untuk perkembangan kognitif anak. Kognitif adalah suatu kemampuan yang berkaitan dengan otak yang dimiliki oleh setiap orang (Yasmin, 2023). Selain itu, murid-murid juga bergerak menyelamatkan diri sesuai dengan praktik yang dilakukan saat simulasi mitigasi bencana melalui program Tagana Masuk Sekolah. Pada saat simulasi mitigasi bencana, murid-murid akan bergerak secara fisik, hal ini berhubungan dengan perkembangan psikomotorik anak. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan dengan gerakan jasmani dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan dan kemauan dalam diri seseorang (Yasmin, 2023). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Edward III yang dikutip oleh (Leo Agustino, 2022: 155) para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

Selain pentransmisi dan kejelasan, konsistensi juga diperlukan dalam berkomunikasi untuk melaksanakan kebijakan. Dalam pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah Kabupaten Sidoarjo awalnya perintah yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo belum konsisten dan masih sering berubah-ubah, namun saat ini perintah tersebut sudah konsisten dan jelas, pelaksanaan sudah didasarkan pada Surat Tugas yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Informasi yang diberikan kepada peserta program juga sudah konsisten dari awal hingga

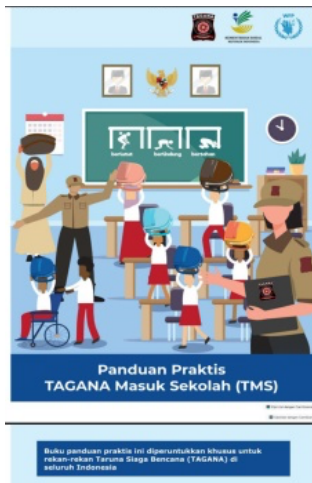
pelaksanaan program selesai, hal tersebut akan mempermudah peserta dalam memahami informasi yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III (Leo Agustino, 2022) perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Namun saat wawancara peneliti menemukan hambatan pada petugas pelaksana yang masih bersifat relawan, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tidak bisa menekan untuk memenuhi target jumlah pelaksanaan program di sekolah-sekolah Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa komunikasi dalam implementasi program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan tercapainya tujuan daripada program Tagana Masuk Sekolah. Namun, masih terdapat hambatan dalam penyaluran komunikasi dan inkonsisten karena Tagana masih bersifat relawan yang menyebabkan Dinas Sosial kurang leluasa dalam memberikan perintah sehingga mempengaruhi pencapaian jumlah target pelaksanaan program

Sumber Daya

Fokus kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Kuantitas berhubungan dengan jumlah staf atau petugas pelaksana yang dimiliki dalam pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Staf pelaksana program Tagana Masuk Sekolah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sejumlah 20 orang yang terdiri dari pemateri, pendamping praktik, dan *icebraker*. Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan kemampuan setiap anggota. Hal ini sesuai dengan pendapat George C Edward III yang dikutip oleh (Anggara, 2014:252) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi staf yang jumlah kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.

Pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo memiliki pedoman dalam pelaksanaannya. Terdapat buku panduan praktis Tagana Masuk Sekolah yang disusun oleh Kementerian Sosial RI kemudian dibagikan di seluruh daerah. Selain buku panduan, pelaksanaan juga berpedoman pada surat edaran dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Adanya pedoman ini supaya pelaksana program mengetahui apa yang harus dilakukan saat pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III (Leo Agustino, 2022) implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.



Dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang lebih komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan di satuan pendidikan dengan melibatkan peran semua pihak dan pemangku kepentingan, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia mengenai pentingnya edukasi kebencanaan. Berdasarkan hal tersebut, dengan hormat kami mohon Saudara segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menginstruksikan kepada kepala dinas pendidikan dan kepala dinas sosial di wilayah kerja Saudara untuk segera melaksanakan kegiatan sosialisasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kepada peserta didik, pendidik, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan melalui Program Tagana Masuk Sekolah. Adapun bentuk kegiatan Program Tagana Masuk Sekolah sebagai berikut:
 - a. pengenalan jenis bencana dan model pengurangan resiko bencana;
 - b. strategi kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi bencana;
 - c. pengorganisasian penanggulangan bencana di satuan pendidikan;
 - d. menentukan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan;
 - e. menentukan dan memasang tanda petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - f. penyampaian informasi/laporan dan permohonan pertolongan;
 - g. pelatihan teknis pertolongan pertama;
 - h. pemberian layanan psikososial; dan
 - i. penyelenggaraan kegiatan simulasi kebencanaan secara rutin.

Gambar 2. Pedoman Pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah

Sumber: Dokumen Tagana Kabupaten Sidoarjo

Gambar 4.2 Merupakan pedoman dalam melakukan implementasi program Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Masuk Sekolah. Adanya dokumentasi tersebut merupakan bukti bahwa pelaksanaan program TMS terdapat pedoman dalam pelaksanaan agar sesuai dengan tahap pelaksanaan dan tujuan yang hendak dicapai. Pada tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah menyelenggarakan program Tagana Masuk Sekolah sebanyak 11 kali. Adapun data tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. Data sekolah yang sudah melaksanakan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Data Tagana Kabupaten Sidoarjo

Nama Sekolah	Tahun Pelaksanaan
MI Al-Ikhlas Suko	2023
SMKN 2 Buduran	2023
SMK 10 Nopember Sidoarjo	2023
SMPN 2 Sidoarjo	2023
SMPN 3 Porong	2023
SMPN 1 Krembung	2023
SMP Budi Utomo Prambon	2023
SDN Popoh Wonoayu	2023
SDN Kenongo 1 Tulangan	2023
SDN Kenongo 2 Tulangan	2023
SDN Dukuhsari 2 Jabon	2023

Tabel 2 di atas merupakan data sekolah di Kabupaten Sidoarjo yang telah melaksanakan program Tagana Masuk Sekolah. Dari data tersebut dapat diketahui pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan pada tingkat SD/MI, SMP, dan SMA/SMK.

Selain staf dan informasi, terdapat pelimpahan wewenang dalam melaksanakan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten sebagai pembina memiliki wewenang dalam pengurusan administratif, pembinaan, koordinasi, dan *monitoring*, kemudian dalam pelaksanaan di lapangan wewenang dilimpahkan kepada koordinator pelaksana. Dinas Sosial menerbitkan Surat Tugas (ST) kemudian diserahkan kepada koordinator, selanjutnya koordinator memiliki wewenang untuk menunjuk anggota tim yang bertugas dengan menyesuaikan kondisi. Kemudian, tim yang bertugas menjalankan program sesuai dengan buku panduan untuk keberhasilan implementasi program Tagana Masuk Sekolah.

Selanjutnya, terdapat fasilitas berupa sarana prasarana yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memberikan fasilitas berupa sarana prasarana sebagai penunjang pekerjaan yaitu aula sebagai tempat untuk berkoordinasi secara langsung, printer, dan laptop. Dinas Sosial juga menyediakan fasilitas penunjang berupa alat peraga untuk simulasi bencana seperti *assembly point*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Edward III yang dikutip oleh (Leo Agustino, 2022) implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Disposisi

Disposisi merupakan faktor penting ketiga yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, pelaksana program tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi pelaksana program memiliki pemahaman dan kemampuan. Dalam pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo pelaksana program telah memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Pelaksana program telah memiliki pengalaman dan telah dibekali dengan pelatihan.

Selanjutnya, keberhasilan implementasi program Tagana Masuk Sekolah juga dilihat dari pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*), hal ini berkaitan dengan penunjukan dan pengangkatan staf yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas serta kompetensinya. Dalam implementasi program Tagana Masuk Sekolah penunjukan staf dilakukan oleh koordinator pelaksana dan diketahui oleh pembina Tagana dengan syarat anggota tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai fasilitator. Pengangkatan staf ini dilakukan berdasarkan kemampuan. Staf yang ditunjuk merupakan anggota Tagana, sehingga tidak ada rekrutmen untuk orang di luar Tagana. Kemudian agar terbentuk pelayan publik yang optimal, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memberikan sebuah pelatihan (*capacity building*) untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaksana program Tagana Masuk Sekolah sehingga pelayanan publik yang optimal akan tercapai.

Namun, dalam hal insentif pelaksana program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan insentif. Selain mendapatkan *capacity building*, seharusnya pelaksana program Tagana Masuk Sekolah mendapatkan insentif karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pelaksana program Tagana Masuk Sekolah tidak mendapatkan insentif, namun hanya mendapat uang bantuan transportasi sebesar Rp.50.000-Rp.100.000 setiap kali melaksanakan program.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu hal penting yang harus dimiliki oleh tiap institusi dalam melaksanakan kebijakan. Dalam pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya *Standar Operating Procedures* (SOP) yang dimuat dalam buku panduan praktis. Di dalam buku panduan praktis Tagana Masuk Sekolah sudah tertulis dengan jelas mengenai langkah apa saja yang perlu dilakukan oleh petugas untuk mencapai tujuan dari program. Hal ini sesuai dengan pernyataan Edward III (Leo Agustino, 2022) SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

Struktur birokrasi juga berkaitan erat dengan struktur pelaksana yang tertulis dan jelas. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai penanggung jawab, staf pengadministrasian umum Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai pembina Tagana, petugas lapangan terdiri dari koordinator pelaksana, petugas pemateri, pendamping tugas, dan humas. Dalam implementasi program Tagana Masuk Sekolah. Pembagian tugas dan tanggung jawab atau fragmentasi diberikan berdasarkan kemampuan dan tupoksi masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Edward III yang dikutip oleh ((Leo Agustino, 2022:158) bahwa dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Komunikasi dalam pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo sudah terlaksana dengan cukup baik, namun masih terdapat hambatan dalam penyaluran komunikasi karena Tagana masih bersifat sebagai relawan, hal tersebut mengakibatkan target jumlah pelaksanaan tidak selalu terpenuhi.

Selanjutnya, sumber daya dalam pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dibidangnya, adanya buku panduan praktis

sebagai pedoman pelaksanaan, pembagian wewenang berdasarkan tupoksi, serta fasilitas yang disediakan dalam menunjang keberhasilan program Tagana Masuk Sekolah sudah baik.

Kemudian disposisi dalam pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya petugas pelaksana program tidak mendapatkan insentif, yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi sikap pelaksana program.

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah menunjukkan adanya SOP yang menjadikan pelaksanaan program menjadi lebih terstruktur. Selain itu fragmentasi atau pembagian tugas dan tanggung jawab sudah terlaksana dengan baik sesuai kemampuan dan tupoksi masing-masing divisi.

Berdasarkan hasil dan pembahasan temuan penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat hambatan dalam komunikasi serta tidak adanya insentif bagi pelaksana program, yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi sikap pelaksana dalam pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan tersebut, sebaiknya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memberikan insentif kepada pelaksana program Tagana Masuk Sekolah agar pelaksana program lebih loyal terhadap pelaksanaan program Tagana Masuk Sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, agar target pelaksanaan program tercapai sebaiknya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo membuat sebuah jadwal kepada pelaksana supaya target pelaksanaan setiap bulannya dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*.
- Armando, S. S., & Arif, L. (2023). *Mitigasi bencana banjir secara terpadu dan kolaboratif*. 14(3), 267–276.
- Beck, M. W., Shepard, C. C., Birkmann, J., Rhyner, J., Welle, T., Witting, M., Wolfertz, J., Martens, J., Maurer, K., Mucke, P., Radtke, K., & Works), B. E. H. (Alliance D. (2023). *WorldRiskReport 2023*. http://www.weltrisikobericht.de/uploads/media/WRR_2012_en_online.pdf
- BPS. (2020). *Sidoarjo Dalam Angka 2020*. 128.
- BPS. (2021). *Sidoarjo Dalam Angka 2021*.
- BPS. (2022). *Sidoarjo Dalam Angka 2022*.
- Kementerian Sosial, WFP, P. (2020). *Panduan Praktis TAGANA Masuk Sekolah*.

- Leo Agustino. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- Lukman, A. (2020). MITIGASI BENCANA GEMPA DI KOTA SURABAYA (Kajian tentang Upaya Antisipatif Pemerintah Kota Surabaya dalam Mengurangi Resiko Bencana). *ILMU ADMINISTRASI NEGARA*, 10.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muljanto, M. A. (2021). Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), 169–181. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v5i2.1386>
- Pratama, W. (2022). *Jawa Timur Dilanda 211 Bencana Sepanjang Tahun 2022*. Suarasurabaya.Net. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/jawa-timur-dilanda-211-bencana-sepanjang-tahun-2022/?amp>
- Utomo, D. D., & Marta, F. Y. D. (2022). Dampak Bencana Alam Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 92–97. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2395>
- W. Adi, A., Shalih, O., Shabrina, F. Z., Rizqi, A., Putra, A. S., Karimah, R., Eveline, F., Alfian, A., Syauqi, Septian, R. T., Widiastono, Y., Bagaskoro, Y., Dewi, A. N., Rahmawati, I., Seniarwan, Suryaningrum, H. A., Purnamasiwi, D. I., & Puspasari, T. J. (2023). *IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia)*. 01, 1–338.
- Yasmin, S. dkk. (2023). Pengaruh Perkembangan Kemampuan Pada Aspek Kognitif, Afektif, Dan Psikomotorik Terhadap Hasil Belajar. *Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Sains*, 3.